

Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik



Judul: Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik
Penulis: Ali Tafriji Biswan
Editor: Primandita Fitriandi
Penerbit: Politeknik Keuangan STAN
Cetakan Pertama: Desember 2022
ISBN: 978-623-6784-38-9

Keuangan publik meliputi pengelolaan anggaran negara, pajak, dan belanja pemerintah. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, bagaimana pada setiap proses pengambilan keputusan di bidang keuangan publik harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Pengantar Pengambilan Keputusan Publik dan Keuangan Publik

Pada awal buku, penulis memberikan pengantar mengenai pengambilan keputusan publik dan keuangan publik. Dalam pengantar tersebut, penulis membahas pengertian dan ruang lingkup pengambilan keputusan yang merupakan aspek penting dalam manajemen, terutama dalam konteks manajemen publik oleh pemerintah. Manajemen itu sendiri terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam proses ini, perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*) menjadi dua elemen yang saling terkait. Keputusan yang diambil dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk memperhatikan adanya unsur ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul. Penulis juga membahas tahapan dalam pengambilan keputusan yang dimulai dengan mendefinisikan permasalahan, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang memungkinkan, menjumlahkan biaya dan manfaat dari alternatif tersebut, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin muncul, dan diakhiri dengan mengambil keputusan. Keterkaitannya dengan keuangan publik adalah pengambilan keputusan ini mencakup studi mengenai peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk kapan seharusnya pemerintah melakukan intervensi ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori Ekonomi dalam Analisis Biaya-Manfaat Keuangan Publik

Pada Bab II penulis memperkenalkan teori ekonomi dalam konteks keuangan publik yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami peran teori ekonomi dalam pengambilan

keputusan kebijakan pemerintah terhadap pasar, permintaan dan penawaran, elastisitas harga, serta efisiensi pasar yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Teori ini juga menjadi landasan dalam memahami konsep alokasi sumber daya publik dan efisiensi ekonomi yang berlandaskan pada kesejahteraan. Dalam pengambilan keputusan publik diharapkan seimbang antara pertumbuhan (*efficiency*) dan pemerataan keadilan (*equity*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud manifestasi pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Penulis menjelaskan bahwa anggaran harus memiliki fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Contoh struktur ringkas APBN dan APBD pada umumnya mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran diarahkan untuk mendukung reformasi struktural guna mempercepat pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat berkelanjutan di masa yang akan datang, maka dari itu saat realisasinya diharapkan untuk menghasilkan surplus anggaran.

Cost Benefit Analysis (CBA) adalah metode yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari proyek atau barang publik guna menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. CBA berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sumber daya yang digunakan sebagai biaya, dengan tujuan untuk memberikan hasil yang optimal. Metode ini sangat berguna ketika efisiensi dan rasionalitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan publik karena dapat memberikan alternatif yang mendukung pencapaian tujuan proyek dengan harapan manfaat maksimum dan risiko minimum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa titik krusial dan tahapan dalam CBA yang perlu diperhatikan. Pertama, *Identifying relevant impacts* yaitu mengidentifikasi semua dampak yang relevan dari proyek. Kedua, *Monetizing impacts* yang berarti mengukur sejauh mana biaya memberikan timbal balik. Ketiga, *Discounting for time and risk* yang melibatkan perhitungan perkiraan dimasa yang akan datang mengenai nilai dari biaya dan manfaat. Terakhir, *Choosing among policies* yaitu memilih kebijakan yang memberikan net benefit paling optimal. Namun, penggunaan CBA tidak terlepas dari kelemahan seperti potensi kesalahan dalam menghitung dan mengukur biaya-manfaat, masalah distribusi manfaat pada proyek atau kebijakan publik, serta ketidakpastian yang mungkin timbul akibat situasi politik, seperti pergantian kekuasaan.

Pengaruh Politik dan Desentralisasi Fiskal dalam Pengambilan Keputusan Publik

Bagian berikutnya penulis membahas bagaimana pengambilan keputusan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor politik seperti kebijakan pemerintah, kepentingan politik, dan tekanan dari berbagai pihak yang kemudian hal tersebut mempengaruhi kebijakan keuangan publik. Aspek ekonomi baik dalam konteks makro maupun mikro berperan penting dalam membentuk keputusan-keputusan tersebut, dengan memahami *political economy* dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan keuangan publik sangat dipengaruhi oleh sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, sebaiknya keputusan tersebut melalui persetujuan rakyat di mana mekanisme agregasi preferensi individu dalam masyarakat dikumpulkan dan dianalisis untuk menciptakan keputusan keuangan publik yang lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas. Kewenangan pemerintah pusat mencakup berbagai bidang seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, serta kebijakan moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penyediaan sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan investasi. Dalam hal ini, desentralisasi fiskal dapat dilakukan yaitu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan mendukung fungsi dan tugas

pemerintahan serta pelayanan publik. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (*vertical fiscal imbalance*), mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus mendukung kesinambungan fiskal. Oleh karena itu tahap desentralisasi fiskal perlu berjalan efektif dengan setiap pengambilan keputusannya sudah mempertimbangkan matang kesejahteraan rakyat

Bagian terakhir penulis membahas tentang pajak dengan menjelaskan dua sistem keadilan pajak yang penting yakni keadilan vertikal (*vertical equity*) yang mengharuskan orang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih banyak melalui tarif pajak progresif dan pajak proporsional dan keadilan horizontal (*horizontal equity*) yang menegaskan bahwa individu dengan pendapatan yang sama harus dikenakan pajak yang sama tanpa memandang sumber penghasilannya, sehingga tidak ada perlakuan istimewa terhadap individu atau perusahaan tertentu. Salah satu studi penting dalam sistem keadilan pajak adalah *tax incidence* ini merupakan analisis untuk menentukan siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak, apakah itu konsumen atau produsen. Kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk mencapai tujuan keadilan ekonomi dan sosial, serta untuk memahami dampak ekonomi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem pajak tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Buku ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya menyajikan konsep pembelajaran mengenai keuangan publik dengan cara yang mudah dipahami dan ringkas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami materi kompleks yang disampaikan didukung dengan *text box* "Fokus Belajar" berada di kiri atas setelah bab dan judul bab pembelajaran, terdapat banyak penyajian contoh terapan dan isu-isu yang dibawakan sehingga pembaca dapat mengaitkan hal tersebut dengan teori yang dituliskan, dan terdapat penugasan serta latihan soal yang membantu pembaca untuk menguji pemahaman mereka terkait materi yang telah dipelajari. Namun terdapat kelemahan dalam buku ini dimana bahan ajaran yang diberikan lebih banyak menggambarkan situasi luar negeri sehingga terdapat keterbatasan dalam konteks Indonesia selain daripada contoh terapan dan isu-isu yang dibawakan memang mengadaptasi keadaan di Indonesia. Kelemahan lainnya adalah terlalu banyak fokus materi yang dibahas sehingga informasi yang disampaikan kurang mendetail dan mendalam.

Penulis: Kanaya Lintang (Mahasiswa Universitas Padjadjaran)

**LEMBAR ABSTRAKSI (CURRENT CONTENT)
TAHUN 2024**

- 1. Proses Collaborative Governance pada Pariwisata Banyu Biru, Kabupaten Nganjuk;** Oleh Ajie Hanif Muzaqi , Berlian Tyasotyaningarum, dan Tian Tri Wardhani; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

This study seeks to achieve two main objectives: first, analyzing the collaborative governance model as a strategy to develop "Banyu Biru" tourism in Gondongwetan Village, Nganjuk Regency, and second, knowing the opportunities and challenges of "Banyu Biru" tourism to be able to develop and compete with other tourism. This research is important to be carried out with the first consideration, Nganjuk Regency is weak in developing its tourism potential considering that its potential is sufficient to compete with other districts in East Java. Second, the local government still lacks collaboration in community empowerment, so it seems that the policy is not participatory. The research method we use is qualitative with a case study approach. The results of our analysis show that the starting conditions model has not run optimally due to the closed attitude of the community and local government to collaborate to empower Banyu Biru tourism, making it difficult to develop and accept new concept innovations. However, the natural and cultural tourism owned by Gondang Wetan Village has the potential to make it a tourist attraction, especially Banyu Biru plus the potential of MSMEs owned.

Keywords: collaborative governance, village government, tourism development.

- 2. Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul;** Oleh Sumarni, Ameliya, dan Arif Kurnianto; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

The purpose of this research is to determine the performance of village officials in Gunungkidul Regency. Its significance lies in the crucial role of village officials as the implementing element of regional autonomy at the lowest level. Village governments influence the success of government programs in terms of governance. In this study, we used a qualitative descriptive research approach, sampling all sub-districts in Gunungkidul Regency, selecting 1-3 villages (desa or kalurahan) from each sub-district. In this research, we used indicators such as output quality, output quantity, working hours, attendance rate, and collaboration. The analysis used in this research is the fishbone analysis. The results of this study show that the performance of Village Apparatus still requires support for improving the quality of human resources because the average performance of Village Apparatus is still low.

Keywords: performance, village, apparatus, gunungkidul, performance evaluation.

- 3. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Kamar Kos di Kota Bandung;** Oleh Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar dan Kania Risdana Ginka; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

Boarding houses, one of the temporary in great-demand residences, will generate regional income (PAD) in Bandung city. This research aims to formulate an effective tax collection strategy for hotel taxes on boarding houses in Bandung City. This research employed a descriptive-qualitative method. The data collection techniques were carried out through interviews, documentation studies, and observation. Moreover, the researcher used SWOT analysis to determine the strategy formulation technique. The findings of the research demonstrated that the implementation of the hotel tax collection policy on boarding houses was consistent with the policy's standards and targets. Even though the implementing agent's characteristics and the implementor's disposition had been carried out quite well, the substance of policy still contains weaknesses concerning the provisions as regards the number of rooms. Other weaknesses are as follows: The quantity of human resources are limited, relationships with other organizations are not close enough, and coordination with political elites is rarely carried out. Furthermore, social, political, and economic

conditions are also less supportive at this time. The Recommended strategies are formulated using a SWOT analysis based on the results of the priority strategy which is the ST (strength-threat) strategy. Those are: organizing regular and sustainable socialization for taxpayers, building coordination between Technical Implementation Unit (IPT) and Village (by involving RW/neighborhood unit), proposing changes to the content of regulations or the legal basis for hotel tax policy on boarding houses, and making a policy brief as a form of policy advocacy.

Keywords: policy implementation, boarding house, house tax, SWOT analysis.

4. Strategi Implementasi Program Open Defecation Free melalui Penyediaan Jamban Sehat di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung; Oleh Raisa Rafifiti Choerunnisa dan Rika Oktoviani; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

This research was conducted in Babakan Ciparay District, Bandung City, with the aim of analyzing program implementation, analyzing program obstacles, and developing program strategies. According to WHO research, 81% of the population in ten countries practice open defecation. Indonesia being the second most populous country whose population defecates in the open. The Open Defecation Free program in Babakan Ciparay District has not been fully implemented due to limited land and the abundance of narrow alleys in the area. This research employs a qualitative method, with data collection techniques including interviews, field observations, and document studies. This research produces a strategy formulation based on the SWOT analysis technique. Research informant search method using purposive sampling. The research results show that the strengths include strong government policies, public outreach, and the development of health facilities. The weaknesses include low public knowledge and education levels, limited government budget, and a lack of supervisory personnel. The opportunities include monitoring by the district team, evaluation and monitoring efforts, and the provision of awards for communities that are 100% Open Defecation Free. To improve Open Defecation Free in Babakan Ciparay District, additional work programs need to be implemented in health centers and triggering locations. These programs include periodic education and increasing the number of Open Defecation Free areas. This initiative can be supported by posyandu cadres, non-governmental organizations, village/district officials, and healthcare organizations.

Keywords: Open Defecation Free, program, community, provision, latrine.

5. Bibliometric Analysis on Internet of Things Application in e-Government for Creating Smart Environment; Oleh Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, Dede Sri Kartini; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik smart environment dalam penggunaan Internet, Bertujuan mendukung E-Government yang menggunakan database Scopus dari tahun 2015 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik dimana publikasinya diambil dari database Scopus dan dianalisis dari tahun 2015 hingga 2023. menggunakan Citespace. Jumlah data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3365, dengan penggunaan kata kunci pada dokumen ini adalah Smart Environment dan Internet Of Things. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 cluster yang didominasi oleh penulis Darmstadt, DE, dengan topik Smart Environment; penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai subjek Smart Environment dan Internet of Things E-Government, Kesimpulan yang didapatkan bahwa jumlah analisis data berjumlah 3365 data yang diambil dari data Scopus tahun 2015-2023 yang menunjukkan adanya 10 cluster

Kata kunci: e-government, internet of things, smart environment.

6. **Analisis Face Recognition Boarding Gate sebagai Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP II Bandung;** Oleh Firda Aprilia, Nanda Ravenska, Septiana Dwi Putrianti, dan Anggi Syahadat Harahap; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) as a company engaged in the field of public transportation services certainly has a duty to be able to provide the best service to all service users. One form of digital transformation innovation that is being carried out is by innovating KAI's face recognition boarding gate as an effort to improve the quality of service at the Station. For this reason, this study aims to see and analyze the extent of incremental innovation and service quality from the implementation of the KAI face recognition boarding gate innovation at Bandung Station. The research method used is descriptive research with a qualitative approach, with the type of case study research. From the research results it can be seen that the incremental innovation carried out by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has met the indicators of sustainable management method innovation, continuous process innovation, and sustainable technological innovation. From the research results, the services provided by the face recognition boarding gate officers at the Bandung Station have fulfilled the service dimensions which include the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. There are also things that need to be done by the company, among others, maximizing the face recognition registration process through the KAI application by using the liveness detection stage and socializing usage through social media to attract audiences and increase the number of users.

Keywords: *incremental innovation, face recognition boarding gate, service quality, boarding.*

7. **Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Elektronik pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Karawang;** Oleh Adila Alanisagita Pusung dan Hanny Purnamasari; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

This study aims to evaluate the effectiveness of electronic services provided by BPJS Kesehatan in Karawang Regency. The electronic services are expected to facilitate public access to services such as membership registration, health facility transfers, and others online, without the need to visit the BPJS Kesehatan office in Karawang Regency. However, the use of these electronic services remains limited among the people of Karawang Regency. This study employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the issues surrounding the effectiveness of BPJS Kesehatan's electronic services in Karawang Regency. Data collection and analysis refer to Effectiveness Theory. The study utilizes data from BPJS Kesehatan staff in Karawang Regency and BPJS participants in the area, with data gathered through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the electronic services provided by BPJS Kesehatan in Karawang Regency are not yet effective. The outreach efforts have not optimally increased public understanding, are not well-targeted, and there are system issues that slow down service delivery. The goal of electronic services – to provide easy, fast, and equitable access – has not yet been achieved, meaning the expected changes in the community have not materialized. To enhance service effectiveness, it is recommended to broaden well-targeted outreach efforts, conduct regular system maintenance, and collaborate with relevant agencies in Karawang Regency and the community so that the goals of electronic services can be achieved and bring about positive change for the public

Keywords: *effectiveness, BPJS Health, electronic services.*

8. **Implementasi e-Government dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;** Oleh Atik Rochaeni, Noer Apptika Fujilestari, dan Tinda Irawaty; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

This research aims to evaluate the implementation of E-government in administrative services at the West Bandung Regency Village Community Empowerment Service. Even though local governments have regulations that support the implementation of E-government, initial observation results show that implementation is still not optimal. The village community is still

not familiar with E-government and the official website which is still under maintenance is the main obstacle. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and literature study. The research results show that the main obstacles to implementing E-government are the low connectivity and use of information technology, lack of competent human resources, and minimal budget allocation. As a result, people have difficulty accessing public services online.

Keywords: *e-government, public services, implementation.*

9. Transformation of Service Quality through Digital-based Waste Management in Semarang City; Oleh Bhakti Nur Avianto, Agnes Wirdayanti, and Adilita Pramanti; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Silampah dalam transformasi pengelolaan limbah di Kota Semarang. Aplikasi Silampah merupakan platform digital yang memungkinkan masyarakat melapor limbah secara real-time kepada otoritas. Melalui analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumenter. Responden penelitian meliputi pekerja sanitasi, pengelola aplikasi, dan komunitas pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Silampah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan limbah di Kota Semarang. Fitur-fitur teknologinya seperti pelaporan limbah real-time, respons cepat pekerja sanitasi, dan kesadaran lingkungan yang ditingkatkan telah meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan partisipasi masyarakat yang belum merata masih perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat pelaksanaan Silampah. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kota-kota lain di Indonesia.

Kata kunci: transformasi, kualitas pelayanan, pengelolaan sampah, pemerintah, partisipasi.

10. Peningkatan Pelayanan Publik: Pengelolaan Ekowisata Di Daerah Provinsi Yogyakarta Berdasarkan Ulasan Sentimen Pengunjung; Oleh Iwan Kurniawan; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

The development of ecotourism, especially in the Provinsi Yogyakarta region known for its rich natural and cultural potential, depends on the improvement of public services. The aim of this research is to identify the strengths and weaknesses in the public services provided by destination managers in Provinsi Yogyakarta through visitor sentiment analysis toward ecotourism in the area. Additionally, the purpose of this sentiment analysis is to explore whether visitors have a positive, negative, or neutral impression of these ecotourism attractions and to evaluate tourism management with various strategies for improvement. The research method uses a quantitative approach by collecting secondary data and processing it through sentiment analysis. The research findings show that tourist destinations in Provinsi Yogyakarta receive predominantly positive reviews, with 44 positive reviews compared to 11 negative ones. Beaches, mountains, museums, and temples are the most frequently visited destinations. Therefore, the development strategies should focus more on these four tourist destinations.

Keywords: *tourism, sentiment, strategy.*

11. Peran Puslatbang PKASN LAN Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik; Oleh Widyawan Pranawa; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

The issue of insufficient skills and capacity among employees, even at the managerial level, who are ineffective in managing public services, has been a persistent problem since the early reform era. This study examines the amendments to Law Number 5 of 2014 on Civil Servants (ASN) by the House of Representatives in 2023, which include changes such as a more flexible ASN recruitment process, ease of mobility for high-performing employees, accelerated competency development, and addressing performance issues among employees. These changes inspired the creation of the ASN Corporate University (Corpu). This research utilizes a descriptive qualitative approach with a case study method. The choice of a qualitative approach is based on the need to thoroughly understand and comprehend the phenomenon under study, grounded in Human Resource Development (HRD) theory and the Corporate University concept. The Corporate University at Puslatbang PKASN has successfully implemented programs that have had a positive impact on ASN HR development. It encompasses three key aspects of ASN HR development: Leadership Training, Talent Management, and Competency and Potential Assessment of ASN employees, reflecting concrete efforts in the development of civil servants in Indonesia.

Keywords: *civil servant, human resources, public services, corporate university.*

12. Evaluasi Kebijakan Perbandingan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara antara Mekanisme Swakelola dan Mekanisme Outsourcing di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara; Oleh Fipi Bela Rosanti dan Rutiana Dwi Wahyunengseh; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

This research is motivated by issues encountered in the implementation of non-civil servant recruitment policies at the Puslatbang PKASN of the National Institute of Public Administration. These issues include the salaries of non-civil servant staff not meeting the regency or municipality minimum wages (UMK) and disciplinary violations due to inadequate work supervision. There are two policy options for recruiting non-civil servants: self-management and outsourcing. Puslatbang PKASN has implemented both mechanisms; however, the benefits of these mechanisms have not yet been analyzed. Therefore, this study aims to evaluate the non-civil servant staff recruitment policy at the PKASN Training Center from an economic perspective by comparing these two recruitment mechanisms. This aligns with one of the objectives of procurement, which is to achieve the best value for money. In this research, the author employs a comparative study using a quantitative method through cost-benefit analysis (CBA). The cost element is assessed based on expenses incurred at each stage of the recruitment process, while the benefit element is evaluated based on the value of the services provided by non-civil servant staff in supporting Non-Tax State Revenue (PNBP) activities at the Puslatbang PKASN. The Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) are used as investment appraisal methods to assess the costs and benefits of the recruitment. The conclusion drawn from the study indicates that both self-management and outsourcing mechanisms are viable for continuing the recruitment of non-civil servants. However, when comparing the two, the self-management mechanism is more beneficial and efficient than the outsourcing mechanism.

Keywords: *non-civil servant recruitment, self-management, outsourcing, cost-benefit analysis.*

INDEKS NASKAH TAHUN 2024 BERDASARKAN ABJAD

1. *Analisis Face Recognition Boarding Gate* Sebagai Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP II Bandung; Oleh Firda Aprilia, Nanda Ravenska, Septiana Dwi Putrianti, dan Anggi Syahadat Harahap; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
2. *Bibliometric Analysis on Internet of Things Application in e-Government for Creating Smart Environment*; Oleh Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, Dede Sri Kartini; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
3. Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Elektronik pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Karawang; Oleh Adila Alanisagita Pusung dan Hanny Purnamasari; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.
4. Evaluasi Kebijakan Perbandingan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara antara Mekanisme Swakelola dan Mekanisme Outsourcing di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara; Oleh Fipi Bela Rosanti dan Rutiana Dwi Wahyunengseh; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.
5. Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul; Oleh Sumarni, Ameliya, dan Arif Kurnianto; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
6. Implementasi *e-Government* dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024; Oleh Atik Rochaeni, Noer Apptika Fujilestari, dan Tinda Irawaty; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.
7. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Kamar Kos di Kota Bandung; Oleh Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar dan Kania Risdana Ginka; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
8. Peran Puslatbang PKASN LAN Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik; Oleh Widyawan Pranawa; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.
9. Peningkatan Pelayanan Publik: Pengelolaan Ekowisata Di Daerah Provinsi Yogyakarta Berdasarkan Ulasan Sentimen Pengunjung; Oleh Iwan Kurniawan; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.
10. Proses *Collaborative Governance* pada Pariwisata Banyu Biru, Kabupaten Nganjuk; Oleh Ajie Hanif Muzaqi, Berlian Tyasotyningarum, dan Tian Tri Wardhani; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
11. Strategi Implementasi Program Open Defecation Free Melalui Penyediaan Jamban Sehat di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung; Oleh Raisa Rafifiti Choerunnisa dan Rika Oktoviani; Volume 27 Nomor 1 Tahun 2024.
12. *Transformation of Service Quality through Digital-based Waste Management in Semarang City*; Oleh Bhakti Nur Avianto, Agnes Wirdayanti, and Adilita Pramanti; Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024.

